

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Margono Rudi. *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Likuidasi Korporasi Pembayar Uang Pengganti*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Banking and Finance*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. SKRIPSI / TESIS

- Jihad Halilintar. “Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili Pemerintah Berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia.” Skripsi. Universitas Jambi, 2024.
- Syafira Arimbi Mahadita. “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang.” Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

C. JURNAL

- Adenan Sitepu, Sulaiman, dan Yulia. “Implementasi Tugas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Luar Pengadilan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024).
- Ainul Amaliyah dan Istiqamah. “Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Alauddin Law Development Journal* (2021): 357–365.
- Iska Tirta Adiyaksa dan Dossy Iskandar Prasetyo. “Peran serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.” *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)* 1, no. 1 (2023).
- Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, dan Moh. Yusuf Hasmin. “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 256–264.

Raul Gindo Cahayo, Dian Ayu Pratiwi, dan Hermalia Fauziah. "Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Sosial dan Sains* 5, no. 2 (2025).

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*

Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.*

Kejaksaan Republik Indonesia. *Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2012.*

E. DOKUMEN DAN DATA INSTANSI

Data Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Periode Januari–Desember 2025.

Data Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Perkara PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan Nomor Register Tanggal 26 Juni 2025.

Data Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tahun 2025–2026. Tanjungpinang: Bidang Datun Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, 2026.

Data Rekapitulasi Permohonan Bantuan Hukum dan Tindakan Hukum Lain Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tahun 2024–2026.

Data Perkara yang Ditangani Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tahun 2024–2026. Tanjungpinang

